

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif *Governance* dan Inovasi Publik: Analisis Multidimensi pada Kepemimpinan Tri Rismaharini di kota Surabaya

**Faqih Savero¹, Muhammad Farrel Mahadika², Wijdan Akmal Sumargi³,
Aniqotul Ummah⁴, Chomariyana Kartika Hesti⁵**
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2,3,4,5}

*Email 2410413167@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410413175@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410413195@mahasiswa.upnvj.ac.id³, aniqotul.ummah@upnvj.ac.id⁴, chomariyanakh@upnvj.ac.id⁵

Diterima: 01-07-2026 | Disetujui: 07-07-2026 | Diterbitkan: 09-07-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze female leadership through the integration of governance and public innovation perspectives, focusing on Tri Rismaharini's tenure as the Mayor of Surabaya (2010–2020). Using a qualitative case study method, data were collected through in-depth interviews and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results indicate that Tri Rismaharini's transformational leadership style successfully harmonized good governance principles—such as participation, accountability, and responsiveness—with sustainable public innovations (e.g., e-government and community-based waste management). From a gender perspective, her empathetic yet decisive communication approach dismantled structural barriers in local bureaucracy. This study concludes that the effectiveness of local governance relies on a multidimensional synergy where adaptive female leadership traits act as a catalyst for institutional collaboration and continuous public innovation.

Keywords: Female Leadership; Governance; Public Innovation; Tri Rismaharini; Local Government.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan melalui integrasi perspektif governance dan inovasi publik, dengan fokus pada masa jabatan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya (2010–2020). Menggunakan metode studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional Tri Rismaharini berhasil menyelaraskan prinsip-prinsip good governance—seperti partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas—dengan inovasi publik yang berkelanjutan (seperti e-government dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat). Dari perspektif gender, pendekatan komunikasinya yang empatik namun tegas mampu meruntuhkan hambatan struktural dalam birokrasi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemerintahan daerah bertumpu pada sinergi multidimensi di mana karakteristik kepemimpinan perempuan yang adaptif bertindak sebagai katalis kolaborasi institusional dan inovasi publik yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan; Governance; Inovasi Publik; Tri Rismaharini; Pemerintah Daerah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Savero, F. ., Mahadika, M. F. ., Sumargi, W. A., Ummah, A. ., & Hesti, C. K. . (2026). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Governance dan Inovasi Publik: Analisis Multidimensi pada Kepemimpinan Tri Rismaharini di kota Surabaya. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 2594-2602. <https://doi.org/10.63822/qgg22587>

PENDAHULUAN

Kajian mengenai kepemimpinan perempuan dalam sektor publik semakin memperoleh perhatian dalam studi governance dan administrasi publik. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam jabatan strategis pemerintahan tidak hanya menunjukkan perkembangan demokrasi yang lebih inklusif, tetapi juga menghadirkan perspektif baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan cenderung memiliki orientasi yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Laporan United Nations Women menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola, transparansi, serta efektivitas pelayanan publik (UN Women, 2020). Dalam konteks tersebut, kepemimpinan perempuan menjadi isu yang relevan untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas pemerintahan daerah.

Di Indonesia, salah satu figur perempuan yang memperoleh perhatian luas dalam praktik pemerintahan daerah adalah Tri Rismaharini ketika menjabat sebagai Wali Kota Surabaya periode 2010–2020. Kepemimpinannya dikenal melalui berbagai kebijakan inovatif yang berorientasi pada pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, pembangunan ruang publik, serta reformasi birokrasi. Berbagai penghargaan nasional maupun internasional yang diterima Kota Surabaya menunjukkan keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan yang dijalankan selama masa kepemimpinannya. Menurut Prasojo dan Kurniawan (2018), keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, tetapi juga oleh gaya kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan organisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.

Dalam perspektif governance, kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai kemampuan individu semata, melainkan sebagai kapasitas untuk membangun jaringan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Rhodes (1996) menjelaskan bahwa governance menekankan pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan interaksi antaraktor dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan itu, Eagly dan Carli (2007) menyatakan bahwa karakteristik kepemimpinan perempuan yang menonjol dalam aspek komunikasi, empati, dan pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan dengan model kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong perubahan institusional secara efektif. Kepemimpinan Tri Rismaharini menunjukkan karakteristik tersebut melalui pendekatan yang tegas namun dekat dengan masyarakat, sehingga mampu menciptakan hubungan yang kuat antara pemerintah daerah dan warga kota.

Selain aspek governance, keberhasilan suatu pemerintahan daerah juga dapat dilihat dari kemampuannya menghasilkan inovasi publik. Inovasi publik merupakan upaya menciptakan atau mengembangkan kebijakan, program, maupun mekanisme pelayanan yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan (Mulgan & Albury, 2003). Selama masa kepemimpinannya, Surabaya berhasil mengembangkan berbagai inovasi seperti penerapan e-government, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengembangan taman kota, serta berbagai layanan publik berbasis teknologi informasi. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan perkotaan yang kompleks (Widodo, 2019).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kepemimpinan Tri Rismaharini maupun inovasi yang berkembang di Kota Surabaya, sebagian besar kajian masih berfokus pada keberhasilan program-

program tertentu, reformasi birokrasi, atau inovasi pelayanan publik secara terpisah. Penelitian yang mengintegrasikan perspektif governance dan inovasi publik untuk menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan berkontribusi terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kepemimpinan perempuan, tata kelola pemerintahan, dan inovasi publik dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menganalisis kepemimpinan Tri Rismaharini secara multidimensional melalui integrasi perspektif governance dan inovasi publik. Penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan program atau kebijakan tertentu, tetapi juga menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan perempuan berinteraksi dengan faktor institusional, sosial, dan birokratis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kepemimpinan publik berbasis gender, khususnya dalam konteks negara berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan: Bagaimana kepemimpinan Tri Rismaharini dalam perspektif governance dan inovasi publik dalam mendorong efektivitas tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran kepemimpinan Tri Rismaharini dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian governance, kepemimpinan perempuan, dan inovasi publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan model kepemimpinan yang inovatif, inklusif, dan adaptif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Pengembangan kajian governance, kepemimpinan perempuan, dan inovasi publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan model kepemimpinan yang inovatif, inklusif, dan adaptif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. mengembangkan model kepemimpinan yang inovatif, inklusif, dan adaptif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. governance dan inovasi publik di Kota Surabaya. Studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena kepemimpinan secara kontekstual dan komprehensif berdasarkan berbagai sumber informasi.

Lokasi penelitian dilakukan secara virtual dengan fokus pada Kota Surabaya sebagai objek kajian. Informan penelitian terdiri atas akademisi, pengamat kebijakan publik, birokrat, serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kepemimpinan Tri Rismaharini. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki informasi relevan dengan tujuan penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara daring menggunakan platform komunikasi digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan kinerja pemerintah daerah, publikasi resmi Pemerintah Kota Surabaya, serta berbagai

sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen kebijakan, dan berbagai literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Multidimensi Kepemimpinan Tri Rismaharini: Governance, Inovasi Publik, dan Gender

Kepemimpinan Tri Rismaharini di Kota Surabaya menjadi salah satu contoh kepemimpinan daerah yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance dengan inovasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selama masa kepemimpinannya, berbagai kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi birokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada kapasitas pemimpin dalam mengelola sumber daya, membangun komunikasi dengan masyarakat, dan menciptakan perubahan yang berorientasi pada kepentingan publik (UNDP, 1997).

Dalam perspektif governance, kepemimpinan Tri Rismaharini mencerminkan penerapan prinsip partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. Berbagai program pembangunan kota tidak hanya dirancang secara top-down oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari government menuju governance, di mana penyelenggaraan pemerintahan melibatkan berbagai aktor dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Kota Surabaya tidak semata-mata merupakan hasil kerja birokrasi, tetapi juga hasil kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.

Selain penguatan tata kelola pemerintahan, kepemimpinan Tri Rismaharini juga ditandai oleh berbagai inovasi publik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, penguatan pengawasan birokrasi, serta pengembangan layanan publik yang lebih mudah diakses menunjukkan adanya komitmen terhadap modernisasi administrasi pemerintahan. Menurut Mulgan dan Albury (2003), inovasi publik merupakan upaya menciptakan metode atau sistem baru yang mampu menghasilkan nilai publik dan meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks Surabaya, inovasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen efisiensi birokrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dari perspektif gender, keberhasilan Tri Rismaharini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam memimpin organisasi publik dan menghasilkan perubahan yang signifikan. Gaya kepemimpinan yang komunikatif, tegas, dan berorientasi pada penyelesaian masalah menjadi karakteristik yang menonjol selama masa kepemimpinannya. Karakteristik tersebut sejalan dengan konsep kepemimpinan transformasional yang menekankan pentingnya visi, kemampuan mempengaruhi bawahan, serta pemberdayaan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan organisasi (Bass & Avolio,

1994). Oleh karena itu, keberhasilan Tri Rismaharini tidak hanya mencerminkan keberhasilan individu sebagai pemimpin, tetapi juga menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.

Analisis terhadap kepemimpinan Tri Rismaharini menunjukkan bahwa dimensi governance, inovasi publik, dan gender saling berkaitan serta membentuk suatu model kepemimpinan yang efektif dalam konteks pemerintahan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik memberikan landasan bagi pelaksanaan kebijakan, inovasi publik menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sementara karakteristik kepemimpinan perempuan memperkuat proses implementasi kebijakan melalui pendekatan yang lebih kolaboratif dan responsif. Dengan demikian, keberhasilan Kota Surabaya selama masa kepemimpinan Tri Rismaharini dapat dipahami sebagai hasil dari sinergi antara kepemimpinan yang kuat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kemampuan menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dampak Kepemimpinan Tri Rismaharini terhadap Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang efisien, berpartisipasi, dan berorientasi pada hasil, kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya telah meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Risma menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, yang mendorong pemerintah untuk bertindak lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kariem dan Ishmatuddin (2021) menemukan bahwa sinergi antara elemen internal dan eksternal pemerintahan berkontribusi pada keberhasilan tata kelola pemerintahan Kota Surabaya selama masa kepemimpinan Risma. Faktor-faktor ini menciptakan standar governance yang baik. Selain itu, ada bukti bahwa kepemimpinan perempuan yang didukung oleh tata kelola yang baik mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik (Rizki & Kurniawan, 2023). Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan Risma berdampak pada bagian administratif dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Setelah itu, reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem kerja pemerintahan, terbukti memiliki dampak yang signifikan. Selama masa kepemimpinannya, Risma dikenal melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan mendorong budaya kerja yang disiplin dan kreatif. Menurut Rahayuningtyas et al. (2025), kepemimpinan transformasional Tri Rismaharini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek pemerintahan kota. Ini termasuk peningkatan manajemen birokrasi dan reformasi sistem e-government. Ardiasanti (2021) memperkuat hal ini dengan mengatakan bahwa sifat inovatif dan kreatif kepemimpinan birokrasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi publik Surabaya. Pada akhirnya, reformasi birokrasi ini membuat pemerintah daerah lebih mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan responsif.

Dalam hal pelayanan publik, pemerintahan Risma melakukan banyak inovasi yang dapat meningkatkan layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengembangan layanan berbasis digital melalui sistem e-government dan Surabaya Single Window (SSW) adalah salah satu bentuk inovasi yang menonjol. Proses pelayanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat berkat transformasi digital ini. Menurut penelitian Kamila dan Puspasari (2025), inovasi digital yang dilakukan oleh SSW meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan responsivitas pelayanan publik di Surabaya. Hasil penelitian Selpi et al. (2025)

menemukan bahwa reformasi birokrasi berbasis digital telah mempercepat proses layanan publik dan mengurangi biaya transaksi pelayanan. Oleh karena itu, pemerintahan Risma berhasil membangun sistem pelayanan yang lebih sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Peningkatan kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah daerah meningkat selama kepemimpinan Tri Rismaharini. Risma mampu membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan warga karena sifat kepemimpinannya yang tegas, empatik, dan dekat dengan masyarakat. Menurut Tuti dan El Adawiyah (2020), model kepemimpinan birokrasi Risma menunjukkan sifat empatik, demokratis, dan usahawan yang mendukung efektivitas birokrasi. Sementara itu, Yanda et al. (2024) mengatakan bahwa beberapa faktor yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah kepedulian sosial yang tinggi, integritas, dan keberanian untuk melakukan reformasi. Kepercayaan publik yang tinggi menyebabkan banyak orang berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Surabaya.

Tetapi kepemimpinan Risma berdampak pada kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun ada beberapa masalah. Studi menunjukkan bahwa penyelesaian berbagai masalah struktural yang lebih kompleks diperlukan untuk keberhasilan pembangunan fisik dan pencitraan kota. Sahab (2017) menyatakan bahwa sebagian masyarakat menilai keberhasilan Risma dari kemampuan untuk membangun citra kepemimpinan yang kuat serta program substantifnya. Namun demikian, penelitian menunjukkan secara umum bahwa kepemimpinan Tri Rismaharini telah menghasilkan transformasi nyata dalam tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya. Akibatnya, pengalaman kepemimpinan Risma dapat digunakan sebagai salah satu model praktik terbaik dalam pengembangan pemerintahan dan inovasi publik di tingkat pemerintah daerah di Indonesia.

Tantangan dan Relevansi Model Kepemimpinan Tri Rismaharini dalam Pemerintahan Kontemporer

Model kepemimpinan Tri Rismaharini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi, tetapi juga oleh kemampuan seorang pemimpin dalam membangun komitmen organisasi, mendorong inovasi, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik, penyelesaian masalah secara langsung, dan pengambilan keputusan yang responsif menjadikan berbagai kebijakan di Kota Surabaya mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan perkotaan. Dalam konteks governance, pola kepemimpinan tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Meskipun demikian, model kepemimpinan tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan ketika diterapkan dalam pemerintahan kontemporer. Salah satu tantangan utama adalah tingginya ketergantungan terhadap figur pemimpin (leadership dependency), sehingga keberhasilan program berpotensi menurun apabila tidak didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat. Selain itu, kompleksitas permasalahan perkotaan, perkembangan teknologi digital, meningkatnya tuntutan transparansi, serta dinamika politik lokal menuntut pola kepemimpinan yang tidak hanya tegas, tetapi juga adaptif, kolaboratif, dan mampu membangun tata kelola berbasis jaringan (network governance). Oleh karena itu, keberlanjutan inovasi

publik memerlukan penguatan kapasitas birokrasi agar tidak bergantung pada karakter personal seorang kepala daerah semata.

Di sisi lain, kepemimpinan Tri Rismaharini tetap memiliki relevansi yang tinggi bagi pemerintahan daerah di Indonesia. Pendekatan yang mengutamakan pelayanan publik, keberanian melakukan reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas. Pengalaman Kota Surabaya menunjukkan bahwa inovasi publik akan berkembang lebih optimal apabila didukung oleh kepemimpinan yang visioner serta budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan.

Dengan demikian, model kepemimpinan Tri Rismaharini dapat dipandang sebagai salah satu praktik baik (best practice) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, implementasinya pada konteks pemerintahan kontemporer memerlukan penyesuaian terhadap karakteristik daerah, kapasitas kelembagaan, serta tantangan sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguatan sistem tata kelola, pengembangan kepemimpinan kolaboratif, serta pelembagaan inovasi publik menjadi faktor penting agar keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada figur pemimpin, tetapi mampu berkelanjutan melalui institusi yang profesional dan adaptif.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Tri Rismaharini meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya. Pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik melalui penerapan kepemimpinan transformasional, reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan kepemimpinan yang tegas, kreatif, dan berorientasi pada kepentingan publik, Surabaya telah membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan. Ini menjadikan Surabaya sebagai salah satu contoh keberhasilan inovasi pemerintahan daerah di Indonesia.

Tetapi model kepemimpinan Tri Rismaharini juga menantang, terutama karena ketergantungan yang tinggi terhadap figur pemimpin dan dinamika pemerintahan modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, untuk memastikan reformasi yang berkelanjutan tidak bergantung pada satu orang, model kepemimpinan ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan inovasi, dan pengembangan kepemimpinan yang bekerja sama dan adaptif. Oleh karena itu, kepemimpinan Tri Rismaharini masih dapat dianggap sebagai praktik terbaik (best practice) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah, kemajuan teknologi, dan tuntutan tata kelola pemerintahan modern yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bason, C. (2018). *Leading public design: Discovering human-centred governance*. Policy Press.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). *Through the labyrinth: The truth about how women become leaders*. Harvard Business School Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulgan, G., & Albury, D. (2003). *Innovation in the public sector*. Cabinet Office Strategy Unit.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Roslina, L., Wahyudi, A., & Lutfi, W. A. (2018). Peran kepemimpinan dalam menumbuhkan inovasi sektor publik di Kabupaten Kulon Progo. In *Inovasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik* (pp. 37–51). Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Suwarno, Y., & Prasetyo, A. G. (2021). Public sector innovation in local government: Challenges and opportunities in the digital era. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Administration Science (ICAS 2021)* (pp. 247–253). Atlantis Press.
- Widodo, J. (2019). *Inovasi administrasi publik*. Rajawali Pers.